

MODEL ALTERNATIF
PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI
PASCA BENCANA BANJIR
BANDANG KOTA BATU
BERBASIS KEMITRAAN LOKAL &
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

by lidya uinsa

Submission date: 11-Dec-2023 11:16PM (UTC+0700)

Submission ID: 2255704134

File name: 18.pdf (1.28M)

Word count: 4242

Character count: 28476



Book Chapter Abdimas
Ekonomi, Ilmu Administrasi,
Ilmu Komunikasi, dan Hukum



Padamu Negeri Kami Mengabdikan

JILID

2

Editor :

Sayyidatul Khoiridah

Dian Ferriswara

Ika Devy Pramudiana

Fedianty Augustinah

Veronika Nugraheni Sri Lestari

Dwi Cahyono



Book Chapter Abdimas
Ekonomi, Ilmu Administrasi,
Ilmu Komunikasi, dan Hukum



Padamu Negeri Kami Mengabdi

JILID 2

5

Editor :

Sayyidatul Khoiridah

Dian Ferriswara

Ika Devy Pramudiana

Fedianty Augustinah

Veronika Nugraheni Sri Lestari

Dwi Cahyono

JILID 2

PADAMU NEGERI KAMI MENGABDI

(Ekonomi, Ilmu Administrasi, Ilmu Komunikasi, dan Hukum)

5

Editor:

Sayyidatul Khoiridah, Dian Ferriswara, Ika Devy Pramudiana,
Fedianty Augustinah, Veronika Nugraheni Sri Lestari, Dwi Cahyono.

Layouter:

Dewi

Design Cover:

Azizur Rachman

copyright © 2022

Penerbit



UNITOMO PRESS

Jl. Semolowaru No 84, Surabaya 60283 Jawa Timur, Indonesia

press@unitomo.ac.id

Telp: (031) 592 5970

Fax: (031) 593 8935

Cetakan Pertama : Februari 2022

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman : x + 266 halaman

Anggota IKAPI: 227/ALB/JTI/2019

ISBN: 978-623-6665-24-4 (jil.2 PDF)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

KONTRIBUTOR

Siti Naviah, Samsul Huda, Fedianty Augustinah, Siti Marwiyah, Vieta Imelda Cornelis, Nihayatus Sholichah, Ika Devy Pramudiana, Sri Roekminiati, Sarwani, Andry Herawati, Liling Listyawati, Veronika Nugraheni Sri Lestari, Masnunah, Dwi Cahyono, Nurmawati, Mustika Winedar, Nur Sayidah, Shanty Ratna Damayanti, Jajuk Suprijati, Alvy Mulyaning Tyas, Sutarmin, Sugiyanto, Wiwik Budiarti, Wella Sandria, Arniwita Sy, Adi Putra, Dian Ferriswara, Sri Kamariyah, Widyawati, Cicilia Tantri Suryawati, Putut handoko, Cahyaningsih Pujimahanani, Safrin Zuraidah, Achmad Chiron, Achmad Kusyairi, Sumaryam, Raden Hartopo Eko Putro, Damajanti Sri Lestari, Eny Haryati, Sapto Pramono, Hendro Wardhono, Priyanto, M. Syahrul Borman, Susi Ratnawati, Nurul Umi Ati, Cahyaning Umul Chasanah Nursyifani, Kus Indarto, Irwantoro, Lukman Arief, Anggraeni Rahmasari, Redi Panuju, Budi Santoso, R. Ayu Erni Jusnita, Sanhari Prawiradiredja, Syaiful Hidayat, Farida, Subekti, Sri Astutik, Galuh Lintang Taslim, Ratnaningsih, dan Sudjatmiko

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, anugerah dan perkenan-Nya, maka luaran dalam bentuk buku bunga rampai atau book chapter kumpulan hasil pengabdian masyarakat dosen-dosen baik dari internal maupun eksternal Universitas Dr. Soetomo Surabaya volume ke-2 ini dengan judul “Padamu Negeri Kami Mengabdi” dapat terselesaikan.

Buku ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Unitomo Press (UP) sebagai leading sektor dalam hal penerbitan buku sekaligus penggagas dari penerbitan book chapter “Padamu Negeri Kami Mengabdi”. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua dosen yang telah memberikan sumbangan pemikiran atas kegiatan pengabdian masyarakatnya yang dikemas dalam bentuk artikel pada book chapter ini. Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua dekan di masing-masing perguruan tinggi yang telah mensupport kegiatan pengabdian dosen sampai dengan penerbitan book chapter ini. Kami berharap hasil luaran berupa book chapter pengabdian ini memberikan nilai kemanfaatan terutama dalam rangka peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi dosen saat ini dan di masa yang akan datang.



Book chapter “Padamu Negeri Kami Mengabdikan” terbagi menjadi dua lingkup buku. Lingkup pertama berisi tentang aspek pendidikan, teknologi, kesehatan, pertanian, perikanan, dan pangan. Lingkup kedua berisi tentang aspek ekonomi, ilmu administrasi, ilmu komunikasi, dan hukum. Semoga dengan terbitnya book chapter ini mampu membangkitkan semangat dalam menerbitkan buku-buku selanjutnya dan semoga menjadi motivasi bagi para dosen untuk selalu menulis dan menerbitkan karyanya dalam bentuk buku. Karena dosen yang profesional adalah dosen yang kreatif dalam pengajaran serta mampu meneliti dan mengabdikan, yang mana hasil penelitian maupun pengabdianannya dapat dituangkan dalam bentuk tulisan karya ilmiah maupun buku seperti ini.

Akhir kata semoga Allah Yang Maha Kuasa melimpahkan kasih dan berkahnya kepada kita semuanya, Aamiin.

Surabaya, Februari 2022
Rektor Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KONTRIBUTOR	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAGIAN PERTAMA: EKONOMI

A. PENDAMPINGAN MENEJEMEN USAHA AYAM RAS PEDAGING (BROILER) KABUPATEN LAMONGAN (Oleh: Siti Naviah dan Samsul Huda)	1
B. PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI (KWT) PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELUARGA (Oleh: Fedianty Augustinah, Siti Marwiyah, dan Vieta Imelda Cornelis)	13
C. PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK DIGITAL MARKETING SAAT PANDEMI COVID-19 BAGI WIRUSAHA DI KABUPATEN PAMEKASAN (Oleh: Fedianty Augustinah, Nihayatus Sholichah, Ika Devy Pramudiana, dan Sri Roekminiati)	27
D. SOSIALISASI PEMASARAN ONLINE DAN MOTIVASI PELAKU USAHA MIKRO DI SENTRA WISATA KULINER PENJARINGANSARI SURABAYA (Oleh: Sarwani, Andry Herawati, dan Liling Listyawati)	41
E. PENDAMPINGAN MASYARAKAT PADA USAHA AYAM PETELUR DI DESA BANDANG DAJAH KABUPATEN BANGKALAN MADURA (Oleh: Veronika Nugraheni Sri Lestari, Masnunah, Dwi Cahyono, dan Nurmawati)	57

- F. Penguatan Rantai Pasokan Unit Toko Koperasi Wanita Medokan Ayu untuk Meningkatkan Penjualan di Tengah Pandemi COVID-19
(Oleh: Mustika Winedar, Nur Sayidah, Shanty Ratna Damayanti, Jajuk Suprijati, dan Alvy Mulyaning Tyas) 67
- G. Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan Infrastruktur Ekonomi sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Hulu Das Brantas Desa Tawang Sari, Pujon, Malang
(Oleh: Sutarmin, Sugiyanto, dan Wiwik Budiarti) 81
- H. Peningkatan Kreativitas Berwirausaha Kelompok Wanita Tani (KWT) Puspa Indah di RT.06 Kelurahan Simpang III Sipin, Kota Baru, Kota Jambi
(Oleh: Wella Sandria, Arniwita Sy, dan Adi Putra) 95

BAGIAN KEDUA: ILMU ADMINISTRASI

- A. Pemberdayaan Pengelolaan Agro Wisata D'Ganjaran Sambibulu Bumdes Sambu Madu Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
(Oleh: Dian Ferriswara, Sri Kamariyah, dan Widyawati) 105
- B. Pariwisata Sumber Dhuwur Desa Wonosari Mojokerto
(Oleh: Cicilia Tantri Suryawati, Putut Handoko, dan Cahyaningsih Pujimahanani) 121
- C. Desa Tangguh Bencana di Desa Bumi Aji Kecamatan Sumber Brantas Kota Batu
(Oleh: Safrin Zuraidah, Achmad Choiron, Achmad Kusyairi, Sumaryam, dan Hartopo Eko Putro)..... 131
- D. Sosialisasi Peran Puskesmas dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Batu
(Oleh: Damajanti Sri Lestari, Andry Herawati, Liling Listyawati, Nihayatus Sholichah, dan Sri Kamariyah) 139

- E. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERDAMPAK
RISIKO BENCANA MELALUI PEMAHAMAN DASAR-
DASAR MITIGASI BENCANA DI SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA 05 KOTA BATU
(Oleh: Eny Haryati, Spto Pramono, Sri Roekminiati, Dian
Ferriswara, dan Widyawati) 157
- F. MODEL PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI PASCA
BENCANA BANJIR BANDANG DI KOTA BATU
(Oleh: Hendro Wardhono, Priyanto, Siti Marwiyah,
M. Syahrul Borman, dan Safrin Zuraidah) 173
- G. MELESTARIKAN BATIK TULIS ASLI SIDOARJO
SEBAGAI WARISAN BUDAYA DAERAH
(Oleh: Susi Ratnawati, Nurul Umi Ati, Cahyaning Umul
Chasanah Nursyifani, dan Kus Indarto)..... 187
- H. PENGEMBANGAN PESANTRENPRENUER
BERBASIS PENERAPAN BUDIDAYA AYAM
KAMPUNG UNGGUL
(Oleh: Irwantoro, Lukman Arief, dan Anggraeni Rahmasari) .. 195

BAGIAN KETIGA: ILMU KOMUNIKASI

- A. PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN *WEBSITE*
DESA PADUSAN KECAMATAN PACET KABUPATEN
MOJOKERTO
(Oleh: Redi Panuju, Budi Santoso, R. Hartopo Eko Putro,
R. Ayu Erni Jusnita, Sanhari Prawiradiredja)..... 207
- B. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM
KOMUNIKASI PUBLIK MELALUI KAMPANYE
SOSIAL DAN KREASI KONTEN MEDIA
(Oleh: Sanhari Prawiradiredja, Redi Panuju, Syaiful Hidayat,
Farida)..... 219

BAGIAN KEEMPAT: HUKUM

- A. HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
(Oleh: Subekti, Sri Astutik, dan Galuh Lintang Taslim) 231

B.	TATA CARA PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DI TEMPAT PENGUNGSIAN ERUPSI GUNUNG SEMERU KABUPATEN LUMAJANG (Oleh: Siti Marwiyah, Hendro Wardhono, Nur Sayidah, Priyanto, M. Syahrul Borman)	241
C.	PENDAMPINGAN AKADEMISI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DISABILITAS DI KABUPATEN LUMAJANG (Oleh: Ratnaningsih dan Sudjatmiko).....	259

**MODEL ALTERNATIF PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI
PASCA BENCANA BANJIR BANDANG KOTA BATU
BERBASIS KEMITRAAN LOKAL & PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

**Hendro wardhono¹, Priyanto², Siti Marwiyah³,
M. Syahrul Borman⁴, Safrin Zuraidah⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Email: ^{1*}hendro.wardono@unitomo.ac.id, ²priyanto@unitomo.ac.id,

³siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id,

⁴msyahrul.bormansh@unitomo.ac.id, ⁵safrin.zuraidah@unitomo.ac.id

1. Pendahuluan

Kondisi pasca bencana adalah keadaan suatu wilayah dalam proses pemulihan setelah terjadinya bencana. Pada kondisi ini dipelajari langkah apa yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait dalam hal upaya untuk mengembalikan tatanan masyarakat seperti semula sebelum terjadinya bencana. Beberapa hal yang dipelajari dalam kondisi pasca bencana ini adalah kecepatan dan ketepatan terutama dalam hal: (i) penanganan korban (pengungsi); (ii) *livelyhood recovery*; (iii) pembangunan infrastruktur; (iv) konseling trauma; (v) tindakan-tindakan preventif ke depan; (vi) organisasi kelembagaan; (viii) stakeholders yang terlibat dalam kegiatan pemulihan sosial ekonomi, termasuk didalamnya adalah pelaksanaan program pendampingan dan atau pembinaannya dalam upaya meningkatkan 'kebangkitan' dan atau daya lenting sosial ekonomi masyarakat yang telah terdampak bencana. Adapun dalam upaya mereduksi sejumlah permasalahan pengurangan risiko bencana tersebut, maka dalam dokumen RPJMN 2015 – 2019 dinyatakan bahwa sasaran yang dicapai dalam penanggulangan bencana adalah menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi sedangkan arah kebijakannya adalah menurunkan risiko bencana dan meningkatkan kapasitas pemerintah, pmda dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 57 UU /24/2007 bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana

meliputi program rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya dalam Pasal 58 dan 59 (UU 24/2007) dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi salah satunya adalah kegiatan pemulihan sosial ekonomi budaya sedangkan dalam rekonstruksi disebutkan kegiatan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Dalam Perka BNPB 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi & Rekonstruksi pada Pasal 3 dinyatakan bahwa untuk aspek ekonomi, antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya yang di dalamnya terdapat kegiatan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perbankan. Sedangkan untuk aspek sosial antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.

Merujuk UU No 24 Tahun 2007, ada hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam upaya mencegah, atau mengurangi resiko timbulnya bencana, yaitu penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana. Pelaksanaan kegiatan pendampingan sosial ekonomi dan pembinaan setelah kegiatan pendampingan sedang dan telah dilakukan sampai dengan saat ini, khususnya pada lingkup tugas Direktorat Pemulihan Sosial Ekonomi - BNPB. Adapun salah satu program ketangguhan yang di-inisiasi oleh BNPB dan sudah cukup populer dalam beberapa kurun waktu terakhir adalah Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Ke depan harapan besarnya adalah program-program yang dirancang untuk memberdayakan komunitas / warga terdampak dapat terintegrasi dengan dinamis serta dapat mereduksi *overlapping* program sehingga capaian kinerjanya secara substantif dapat lebih optimal.

Adapun sejumlah fakta dan permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan sosial ekonomi yang sedang dan telah dilakukan, antara lain (i) secara filosofis dan konseptual hakikatnya makna sosial ekonomi adalah 'integrated' sehingga secara normatif dan praktek tidak perlu dipisahkan, namun dalam pelaksanaannya, kegiatan pendampingan sosial dan pendampingan ekonomi dilakukan secara terpisah; (ii) upaya mewujudkan ketangguhan komunitas melalui program Desa Tangguh Bencana perlu mendapatkan

dukungan dari berbagai pihak, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan sosial dan ekonomi yang telah dilakukan 'belum sepenuhnya' bersinergi dengan Program Desa Tangguh Bencana, sehingga dalam hal ini diperlukan formulasi strategi sinergitas kegiatan pemulihan sosial ekonomi dengan Program Desa Tangguh Bencana; (iii) sampai saat ini belum ditemukan 'kekhasan' dalam pendampingan dan pembinaan kelompok sasaran / masyarakat terdampak bencana sehingga dalam implementasinya, program pendampingan ekonomi yang dilakukan 'identik' dengan program pendampingan yang dilakukan oleh instansi dan pihak lainnya. Selanjutnya, (iv) dalam upaya meningkatkan keberlanjutan program dengan melibatkan pihak lain, khususnya dunia usaha pada tingkat lokal masih belum dilakukan dengan lebih optimal, sedangkan upaya melibatkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sudah dilakukan akan tetapi beresiko terhadap 'duplikasi program' oleh karena boleh jadi OPD yang ada di level pemerintah kabupaten/ kota mempunyai program yang lebih kurang sama; (v) pelibatan kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas untuk ikut melakukan program pendampingan dan kemitraan secara berkelanjutan, khususnya perguruan tinggi / universitas di tingkat lokal (kabupaten / provinsi) masih belum dilakukan yang boleh jadi dapat berpengaruh pada keberlanjutan program; (vi) penyusunan database berbasis *information technology* (IT) serta upaya *networking* berbasis *database* tersebut dengan lembaga atau kementerian lainnya terkait dengan kelompok binaan / sasaran yang telah dihasilkan oleh program pendampingan dan pembinaan masih pada tahap inisiasi awal dan diperlukan pengembangan formulasi model yang lebih kreatif dan inovatif; serta (vii) tata kelola program / kegiatan pendampingan yang masih perlu dikembangkan agar dapat lebih mendorong akuntabilitas pelaksanaan program serta keberlanjutan (*sustainability*) dan sinergitas dengan Program Desa Tangguh Bencana.

Kota batu merupakan salah satu wilayah yang memiliki dataran tinggi yang ada di Jawa Timur. Kota batu memiliki luas wilayah 19.908,72 Ha yang terbagi menjadi 3 kecamatan yakni Bumiaji, Batu dan Junrejo. Kota Batu yang terletak 800 meter diatas permukaan air laut, memiliki 3 (tiga) buah gunung yang telah dikenal dan telah diakui secara nasional. Gunung-gunung tersebut adalah Gunung Panderman (2010 m), Gunung Welirang (3156 m), Gunung Arjuno (3339 m) dan

2

masih banyak lagi lainnya. Dengan kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan kota Batu terkenal sebagai daerah dingin. Temperatur rata-rata kota Batu 21,5°C, dengan temperatur tertinggi 27,2°C dan terendah 14,9°C. Rata-rata kelembaban udara 86% dan kecepatan angin 10,73 km/jam. Curah hujan tertinggi di kecamatan Bumiaji sebesar 2471 mm dan hari hujan 134 hari. Data-data diatas menunjukkan bahwa Kota Batu adalah salah satu destinasi wisata yang rawan bencana, khususnya bencana banjir dan banjir bandang serta tanah longsor. Salah satu bencana banjir yang terjadi pada akhir tahun 2021 adalah banjir bandang di Desa Sumber Brantas dan Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, pada Kamis 4 November 2021, bencana tersebut tidak hanya merusak bangunan tetapi juga merenggut korban jiwa. Tersaji data dan fakta kejadian banjir bandang di Kota Batu, sebagaimana terlihat pada gambar.1.



Gambar 1. Data dan fakta kejadian banjir bandang di Kota Batu

2. Kajian Teori

2.1 Kebijakan pemulihan sosek: tinjauan dari perspektif *empowerment*

Merujuk pada Perka BNPB 11/ 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi & Rekonstruksi, pada Huruf G, yang dimaksud dengan pemulihan sosial ekonomi budaya adalah upaya untuk memfungsikan kembali kegiatan dan/atau lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali di kaitkan dengan kemampuan membuat orang lain melakukan apa yang diinginkannya, terlepas dari keinginan dan minatnya yang berkaitan dengan pengaruh dan kontrol (Suharto, 2005).

Selanjutnya, rujukan utama Program Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya didasarkan atas UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya pada pasal 58 huruf g tentang Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya dan pasal 59 huruf f tentang Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi & Budaya. Selain itu juga dapat merujuk pada PP No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pada Pasal 56 dan Pasal 71. Terkait program Pemulihan dimaksud, pedoman pelaksanaannya dapat merujuk pada Perka BNPB 11/ 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi & Rekonstruksi, pada Huruf G, Adapun indikator Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya dengan cakupan kegiatan seperti pada tabel.1.

Tabel.1 Indikator Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya

ASPEK	INDIKATOR CAPAIAN
Sosial	<ul style="list-style-type: none">▪ Terselenggaranya kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.▪ Berfungsinya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan.▪ Meningkatnya jumlah peserta kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">▪ Terselenggaranya kegiatan produksi dan distribusi barang-barang bernilai ekonomi baik perorangan maupun lembaga.▪ Terselenggaranya transaksi ekonomi baik di pasar maupun di luar pasar baik perorangan maupun lembaga.▪ Meningkatnya jumlah produksi dan distribusi barang-barang bernilai ekonomi baik perorangan maupun lembaga.▪ Meningkatnya jumlah anggota masyarakat dan atau lembaga ekonomi yang terlibat dalam kegiatan produksi dan distribusi barang-barang ekonomi.
Budaya	<ul style="list-style-type: none">▪ Terselenggaranya kegiatan budaya misalnya: kesenian dan upacara adat.▪ Meningkatnya jumlah anggota masyarakat dan lembaga budaya yang terlibat dalam kegiatan budaya.

3. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai sejumlah indikator Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya, maka perencanaan dan persyaratan teknis program / kegiatan Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Budaya adalah sebagai berikut : (a) Setiap kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dijelaskan di atas harus diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci pemulihan sosial, ekonomi dan budaya yang setidaknya mencakup aspek-aspek : (i) kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi dan budaya yang menjadi sasaran; (ii) permasalahan yang dihadapi; (iii) sumberdaya yang tersedia; (iv) skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaannya; (v) rencana pembiayaan; dan (vi) penyelenggara; (b) Penyusunan rencana teknis pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilakukan oleh BPBD dibantu oleh lembaga/dinas/ instansi yang relevan; dan (c) Mekanisme dan teknis pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya harus mempertimbangkan karakter, kondisi dan situasi masyarakat yang menjadi korban bencana serta mengacu pada ketentuan-ketentuan lain yang relevan dan telah ditetapkan oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan dan organisasi Program Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Budaya, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : (a) program pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilaksanakan oleh BPBD dibantu lembaga/dinas/instansi

terkait; (b) kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilakukan melalui : (i) layanan advokasi dan konseling; (ii) bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan (iii) pelatihan; (c) dalam hal program pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota, koordinasi dilakukan oleh BPBD dan Pemerintah Provinsi dan atau BNPB; (d) dalam hal program pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah provinsi, koordinasi dilakukan BNPB; dan (e) kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilaksanakan dengan menjunjung rasa keadilan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi (Kartasmita, 1997), yaitu : Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian mereka sudah punah.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*protecting*).

Dengan demikian, program pemulihan sosial ekonomi tidak berpola 'dependency creating' akan tetapi bercorak '*empowering*' yang lebih menekankan pada proses pembelajarannya serta pelibatan secara intensif komunitas dalam kegiatan pembelajaran dan atau pemberdayaan yang akan dilakukan. Adapun perbedaan antara *dependency creating* dan *empowering* (Moeljarto, 1996) dapat dilihat pada matriks tabel 2.

Tabel.2 Perbedaan antara *dependency creating* dan *empowering*

	Empowering	Dependency Creating
Prakarasa	Di Desa	Di Ibukota
Desain Program	Pemecahan Masalah	Rencana Formal
Teknologi	Pengelolaan Lokal	Statis, Dominasi Pakar
Sumber Utama	Asli-Ilmiah	Ilmiah
Organisasi	Lokal	Pusat
Pendukung	Diterima	Diabaikan
Pertumbuhan	Dibina Dari Bawah	Dibina Dari Atas
Pembinaan	Tahap demi Tahap	Cepat-Mekanistik
Diorganisir	Tim Interdisipliner	Technical Spesialis
Evaluasi	Oleh Diri Sendiri dan Berkesinambungan	Eksternal dan <i>Impact Oriented</i>
Kepemimpinan	Kuat Berlanjut dan Individual	Terbatas Berganti dan Positional
Analisis Sosial	Untuk Definisi Masalah dan Perbaikan Program	Untuk Membenarkan Rencana & Memenuhi Persyaratan Evaluasi
Fokus Manajemen	Kelangsungan Berfungsinya Sistem & Kelembagaan	Selesaiannya Proyek Pada Waktu yang Ditentukan

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Rekomendasi kebijakan

Bahwa pada dasarnya kegiatan pemulihan sosial ekonomi pada tahap pasca adalah merupakan proses pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) yang berupaya menumbuhkan dan atau mengembangkan potensi komunitas/warga terdampak berdasarkan isu-isu dan konteks lokal (*local issues & local context*) yang tujuan akhirnya bukan semata-mata untuk kebangkitan social ekonomi pada skala lokal akan tetapi di dalamnya termasuk meningkatkan ketangguhan komunitas lokal dalam menghadapi bencana. Dan komunitas bisa dinyatakan ‘tangguh’ dalam menghadapi bencana pada dasarnya merujuk pada dua kata kunci, yakni ‘selamat’ dan ‘bangkit kembali’. Maksudnya adalah bahwa ketika seseorang dan atau komunitas berada di wilayah terdampak bencana, maka mereka mampu ‘secara minimal’ merencanakan, mengorganisasi dan menerapkan tahapan penyelamatan paling tidak untuk diri dan atau komunitasnya agar dapat terhindar dari bencana yang terjadi serta mampu bangkit kembali dari keterpurukan akibat bencana baik secara mental/spiritual (dalam domain ilahiyah) maupun dalam domain non-ilahiyah (material termasuk aspek social ekonomi).

Dalam pelaksanaannya direkomendasikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip pendampingan dan pekerjaan sosial, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur atau 3P, yakni pemungkin (*enabling*), pendukung (*supporting*), dan pelindung (*protecting*).

5. Kesimpulan

Merujuk pada prinsip-prinsip strategi pemberdayaan masyarakat, maka dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pemulihan sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan ketangguhan komunitas dan atau warga terdampak dalam masa pasca bencana, diusulkan pola monitoring dan evaluasinya bertumpu pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dan atau memperhatikan unsur-unsur pemberdayaan, sebagaimana terlihat pada tabel.3 dibawah ini :

Tabel 3. Kisi-kisi model alternatif implementasi kebijakan pemulihan sosial ekonomi berbasis kemitraan & empowerment

	Local Issues	Local Autonomy	Local Accountability
Enabling (menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang)	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya membangun 'rapport' dengan komunitas dengan mempelajari profil dan atau karakter komunitas; - Pelaksanaan <i>assessment / social mapping</i> pada komunitas untuk menggali beragam informasi dan potensi terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelibatan kepemimpinan pada tingkat komunitas / lokal khususnya yang terkait dengan model / pola pengambilan keputusan yang selama ini sudah dijalankan; - Untuk identifikasi kemampuan institusi / lembaga di tingkat lokal dalam mengelola program secara 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kajian evaluatif terhadap implementasi program-program pemberdayaan yang pernah diperoleh, khususnya yang berhubungan dengan upaya-upaya yang sedang dan telah dilakukan untuk keberlanjutan program - Kajian evaluatif terhadap kendala-kendala yang dihadapi komunitas dalam melakukan pengembangan

	kegiatan sosial ekonomi komunitas / warga terdampak (sebelum dan sesudah kejadian)	otonom sekaligus pola pengambilan keputusannya	program yang sudah pernah dilaksanakan khususnya yang terkait dengan penempatan posisi komunitas sebagai 'subyek atau obyek dalam program tersebut.
Empowering (memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat)	- Merumuskan rancangan dan pelaksanaan model kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan <i>assessment</i> atau <i>social mapping</i> yang telah dilakukan dengan mengedepankan prinsip pembelajaran yang dapat mendorong tumbuhnya proses pembelajaran sosial bagi komunitas lokal. Sekaligus melakukan evaluasi harian untuk	- Melakukan kegiatan pembekalan / pelatihan sekaligus penguatan yang dilakukan untuk institusi-institusi lokal agar dapat mengelola program secara mandiri. Termasuk pelibatan dunia usaha dan lembaga perguruan tinggi setempat perlu dilakukan untuk mendorong penguatan tata kelola dalam skala lokal.	- Penguatan terhadap representasi elemen komunitas dalam lingkup kepemimpinan formal maupun non formal terkait dengan akuntabilitas program yang akan beralih menjadi tanggung jawab masyarakat / komunitas dalam upaya pengembangan dan keberlanjutan program yang berpijak pada swadaya komunitas.

	tindak lanjut model pembelajaran berikutnya.		
Protecting (melindungi dan mencegah eksploitasi yang kuat atas yang lemah untuk keberlanjutan program)	- Mendorong dan menumbuhkan potensi-potensi lokal untuk dapat melakukan monitoring dan evaluasi program secara mandiri serta mengembangkan instrumen yang sesuai dengan isu-isu program pada tingkat lokal.	- Mendorong institusi lokal dalam merumuskan 'rule of game' terkait pengelolaan program agar hasilnya dapat dipastikan bermanfaat bagi seluruh elemen komunitas dan bukan pada kelompok / golongan tertentu.	- Mendorong upaya terselenggaranya akuntabilitas program baik secara transparan dan partisipatif, antara lain dengan membuka saluran pengaduan yang dapat diakses dengan mudah oleh warga ketika ditemukan kesalahan atau penyimpangan dalam implementasi program.

Referensi

- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1997). *Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pusat Kesenian Jakarta.
- Moeljarjo, T. (1996). *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. (2005). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- Perka BNPB 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi & Rekonstruksi.

Biografi Penulis 1



Dr. Hendro Wardhono, M.Si, dosen (dPk) di FIA Universitas Dr. Soetomo. Lahir di Sidoarjo, 9 Oktober 1968, Pendidikan S1, S2 dan S3 di FIA Universitas Brawijaya jurusan Administrasi Publik, bidang studi *public policy*. Pernah menjabat sebagai Wadep III tahun 1999 – 2002, juga pernah menjadi Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi (MIA) tahun 2008 - 2010. Dan sejak tahun 2014 - sekarang menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana dan Lingkungan (PSBL). Pada tahun 2012 – 2017 di DPRD Jawa Timur sebagai Unsur Pengarah Masyarakat Profesional BPBD Prov. Jawa Timur. Tahun 2015 anggota DELRI (Delegasi Republik Indonesia) mengikuti *World Conference Disaster Risk Reduction* di Sendai, Jepang. Hingga saat menjadi *guest lecture* di Wako University – Japan dan Universiti Utara Malaysia (UUM) untuk materi Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Selain ini menjadi Direktur Pusat Penelitian & Pelatihan Indonesia Tangguh (PUSPPITA) di Surabaya. Sejak tahun 2014 bergabung dalam Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) dan sejak tahun 2017 menjadi Wakil Ketua IV. Sampai saat ini aktif dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang kebencanaan.

Biografi Penulis 2



Priyanto, lahir di Malang, 07 Agustus 1968, pendidikan terakhir S3 Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Memulai karir sebagai dosen Fakultas Ilmu Administrasi Unitomo Surabaya pada tahun 1992. Saat ini menjabat Kaprodi Magister Ilmu Administrasi dan Kepala Pusat Studi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Unitomo Surabaya.

Biografi Penulis 3



Dr. Siti Marwiyah, SH, MH, lahir di Pamekasan tanggal 28 April 1968, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya, saat ini menjabat Rektor Univ. DR. Soetomo periode 2021-2025, sebelumnya sebagai Warek 1, Dekan dua periode, Wadep I dua periode, Ketua LKBH, Sekretaris LKBH, dan saat ini masih aktif sebagai Advokat. S1 dan S2 Ilmu Hukum diselesaikan di UII tahun 1992 dan 2004, dan S3 di PDIH UB diselesaikan tahun 2015 dengan predikat Cumlaude. Aktif melakukan penelitian mendapatkan hibah dikti, di tahun 2013 dan 2016, hibah buku ajar dari kemenristek dikti, menulis beberapa buku, dan artikel di beberapa media. Aktif di organisasi sebagai Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN (2021-2025), Wasekjen PP APHATN-HAN (2016-2021), Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN DPD Jatim, Ketua Pusat Kajian Konstitusi (PKK) Jatim, Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) Jatim,

Biografi Penulis 4



Dr. M. Syahrul Borman SH, MH, dilahirkan di Palu tanggal 12 desember 1959, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya, Jabatan struktural yang pernah dijabat yaitu sebagai Wakil Dekan I 1988-1992, Pembantu Dekan III 1992-1995, Ketua Laboratorium FH 1996-1997, Pembantu Dekan I 1997-2000, Dekan FH 2000-2004, 2004-2008, Pengurus LKBH LKBH 2008-2012, dan saat ini masih aktif sebagai Advokat. S1 dan S2 Ilmu Hukum dari UNAIR tahun 1985 dan 1997. Kegiatan Tri Dharma dengan melakukan penelitian hibah dikti. Jabatan di organisasi sebagai pengurus Asosiasi Pengajar HTN-HAN DPD Jatim.

Biografi Penulis 5



Safrin Zuraidah, lahir di Pasuruan, 27 Juli 1962. Menempuh Pendidikan S1 dan S2 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jurusan Teknik Sipil bidang keahlian Struktur Angkatan 1995. Awal karir di UNITOMO sebagai dosen 1995, pernah menjabat sebagai Sekretaris Prodi dan Ketua Prodi Teknik Sipil Unitomo dua periode, Pembantu Dekan Bidang SDM dan Keuangan, serta pernah menjabat sebagai Dekan pada tahun 2012-2016. Saat ini menjabat sebagai Direktur LSP di Unitomo. Telah banyak penelitian yang dilakukan, selalu mendapatkan hibah penelitian dari DIKTI mulai tahun 2005 sampai 2020 terkait bidang yang ditekuni. Karyanya Hak cipta berupa Buku, Publikasi Ilmiah, dan Penelitian sudah banyak dipublikasikan diberbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional.

MODEL ALTERNATIF PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI PASCA BENCANA BANJIR BANDANG KOTA BATU BERBASIS KEMITRAAN LOKAL & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sirisma.unisri.ac.id Internet Source	6%
2	www.geovolcan.com Internet Source	4%
3	ejournal.kemsos.go.id Internet Source	3%
4	jcomm.unram.ac.id Internet Source	3%
5	books.google.co.id Internet Source	3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On

MODEL ALTERNATIF PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI PASCA BENCANA BANJIR BANDANG KOTA BATU BERBASIS KEMITRAAN LOKAL & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25